

STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TASIKMALAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Elza Nurul Fadilah¹, Asep Nurwanda², Erlan Suwarlan³

^{1,2,3}Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

Corresponding Author: elza_nurul@student.unigal.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i2.596>

Article Info

Article History;

Received:

2025-09-25

Revised:

2025-10-02

Accepted:

2025-12-31

Abstrak: Pengelolaan sampah yang baik merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Tanpa sistem pengelolaan yang memadai, sampah dapat menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari pencemaran lingkungan hingga gangguan kesehatan. Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, penanganan yang belum optimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam permasalahan pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara kepada informan yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan belum berjalan secara optimal. Beberapa aspek sudah menunjukkan kemajuan strategis, seperti penyusunan visi misi dan keterbukaan terhadap kolaborasi eksternal. Namun, implementasi strategi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan anggaran, fasilitas yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Upaya yang dilakukan Dinas meliputi pengajuan penambahan anggaran kepada pemerintah serta pemanfaatan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pihak swasta untuk mendukung peningkatan fasilitas dan kegiatan edukasi masyarakat. Strategi yang diterapkan masih bersifat teknis dan belum didukung oleh sistem kelembagaan dan partisipatif yang kuat.

Kata Kunci: Strategi, Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan isu penting yang dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Tasikmalaya. Salah satu aspek yang paling nyata dirasakan oleh masyarakat adalah persoalan pengelolaan sampah. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah perkotaan menyebabkan volume sampah meningkat setiap hari. Kosassy et al., (2022) menjelaskan bahwa jika sampah tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, bau menyengat, dan gangguan kesehatan masyarakat. Jumlah penduduk Indonesia pada Tahun 2023 yaitu mencapai 278.896.200 jiwa, sedangkan pada pertengahan Tahun 2024 diproyeksikan meningkat menjadi 281,603,8 jiwa (2). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sekitar 2,7 juta jiwa dalam kurun waktu satu tahun. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan populasi yang berkelanjutan di Indonesia, meskipun laju pertumbuhannya cenderung melambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Negara-negara berkembang yang tergabung di dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) berperan sebagai penyumbang sampah terbesar di dunia, dimana penimbunan sampah yang dihasilkan mencapai 572 juta ton per tahun dengan rentangan nilai perkapita 1,1 sampai 3,7 kilogram setiap orang perharinya (3).

Kota Tasikmalaya sebagai salah satu kota di Jawa Barat tidak luput dari permasalahan tersebut. Sampah yang tidak ditangani dengan baik sering menumpuk di Tempat Pembuangan Sementara

maupun di lokasi liar yang bukan tempatnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mengurangi serta menangani sampah secara tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti armada pengangkut, petugas kebersihan, dan tempat pemrosesan akhir, menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup selaku instansi yang berwenang. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah dari sumbernya juga memberikan kontribusi negatif terhadap memburuknya situasi.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan sekitar 68,5 juta ton sampah pada tahun 2021, dengan sekitar 60% berasal dari sampah rumah tangga. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, timbunan sampah harian tersebut mencapai lebih dari 200 ton per hari, dengan tingkat pengelolaan yang belum optimal. Pemerintah melalui Jakstranas (Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga) menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan 70% pada tahun 2025. Target tersebut hanya dapat dicapai apabila setiap daerah memiliki strategi pengelolaan sampah yang efektif, adaptif, dan partisipatif, termasuk Kota Tasikmalaya.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi teknis yang diberi tanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program, serta mengoordinasikan berbagai pihak untuk menangani persoalan tentang sampah. Namun, dalam praktiknya, Dinas Lingkungan Hidup masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas strategi yang diterapkan, seperti keterbatasan anggaran, jumlah armada pengangkut yang tidak mencukupi, keterbatasan tempat pembuangan akhir, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada Tahun 2023 mencapai 741,760 jiwa, kemudian terdapat peningkatan pada Tahun 2024 menjadi 750,73 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ini berdampak terhadap volume sampah yang dihasilkan, sehingga diperlukan upaya pengelolaan sampah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbunan sampah harian Kota Tasikmalaya Tahun 2024 mencapai 333,44 ton/ hari, sedangkan timbunan sampah tahunannya mencapai 121,705.09 ton. Pengelolaan sampah yang tidak efektif menyebabkan lingkungan tampak kumuh. Sampah yang menumpuk berpotensi menjadi sumber penyakit.

Suwarlan (2022) menjelaskan bahwa strategi dalam organisasi publik harus mencerminkan hubungan yang efektif antara sumber daya organisasi dan lingkungan yang dihadapi, sehingga dapat mencapai kondisi yang paling menguntungkan bagi pelaksanaan tugas organisasi. Strategi tidak hanya berupa rencana jangka panjang, tetapi juga mencerminkan bagaimana sebuah organisasi merespons tantangan dan peluang secara dinamis dalam proses perumusan kebijakan hingga implementasi. Strategi pengelolaan sampah bukan hanya sekadar tindakan teknis pengumpulan dan pembuangan, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan terstruktur, investasi yang signifikan dalam infrastruktur dan sumber daya manusia (5). Strategi tersebut harus mencakup perencanaan jangka panjang yang berorientasi pada pengurangan sampah dari sumber, penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan koordinasi antarinstansi.

Dalam permasalahan ini, visi dan misi kelembagaan, kemampuan internal dinas, serta kemampuan beradaptasi terhadap dinamika sosial dan lingkungan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi. Nurwanda (2019) menyatakan bahwa strategi merupakan suatu cara atau teknik di mana sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai tujuannya

sesuai dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta kemampuan internal dan sumber daya yang dimiliki. Pendekatan strategis ini menjadi sangat penting khususnya dalam menangani isu-isu yang kompleks seperti pengelolaan sampah.

Dalam upaya mengatasi masalah pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah mengeluarkan beberapa regulasi, antara lain Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah, yang menetapkan kerangka hukum untuk pengelolaan sampah yang mencakup aspek pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan sampah. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat juga Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2019 yang mengatur kebijakan dan strategi Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Perwal ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 yang menekankan pentingnya strategi nasional dalam pengelolaan sampah.

Dalam menghadapi kompleksitas persoalan sampah, peran pemerintah daerah melalui lembaga teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup harus diiringi dengan kapasitas kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, serta strategi yang mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan lingkungan. Hal ini penting karena pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara instan maupun parsial. Setiap langkah strategis yang diambil harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari regulasi, struktur organisasi, pola kemitraan dengan sektor swasta, hingga potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian, strategi yang disusun tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diterapkan dan memberikan dampak nyata dalam menanggulangi permasalahan sampah secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator masalah yang merupakan hasil nyata yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, yang menjadi tantangan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup yang menjadi perhatian serius dalam pembangunan daerah, yaitu:

1. Belum optimalnya pemantauan, pengendalian, dan penegakan hukum lingkungan untuk pelestarian lingkungan hidup. Masalah ini mengacu pada kurang maksimalnya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap berbagai aktivitas masyarakat dan industri yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan.
2. Penanganan sampah masih belum optimal, yang menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah belum berjalan efektif.
3. Infrastruktur pengelolaan sampah sudah ada, namun kurang memadai karena terdapat beberapa yang terkadang mengalami kerusakan sehingga dapat menghambat.
4. Peran masyarakat masih kurang dalam pengurangan sampah.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di berbagai daerah telah banyak dikaji. Penelitian yang dilakukan oleh Herman (2023) mengkaji strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang. Sistem pengelolaan yang diteliti masih menggunakan metode *open dumping*, dengan berbagai permasalahan seperti buruknya akses jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir, terbatasnya armada pengangkut, serta belum adanya sanksi yang tegas kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan sampah di Subang masih belum efektif karena keterbatasan sarana dan lemahnya pengawasan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rusmanto (2022) yang berfokus pada strategi pengelolaan sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Permasalahan utama yang ditemukan adalah ketiadaan TPA milik sendiri dan

meningkatnya volume sampah yang tidak tertangani, hingga menumpuk di TPS liar di pinggir jalan. Hasil penelitiannya menunjukkan perlunya pembaruan strategi yang mencakup pengembangan teknologi pengelolaan sampah serta peningkatan kolaborasi dengan masyarakat untuk mendorong partisipasi publik dalam penanganan sampah. Kemudian, Arrahma (2024) meneliti strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang menggunakan pendekatan analisis SWOT. Penelitian ini menyoroti keberhasilan program seperti Bank Sampah dan TPS 3R Jogoroto, serta kolaborasi lintas sektor yang mendorong efektivitas pengelolaan. Namun demikian, keterbatasan SDM, kurangnya sosialisasi, dan tidak meratanya distribusi TPS masih menjadi kendala.

Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal penggunaan pendekatan kualitatif dan fokus pada strategi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani permasalahan sampah. Namun, belum ada di antara penelitian tersebut yang secara khusus membahas strategi pengelolaan sampah dengan meninjau dari perumusan strategi, implementasi, hingga evaluasi yang terstruktur. Penelitian tersebut juga lebih menyoroti permasalahan teknis dan operasional, belum mencoba mengkaji secara menyeluruh sejauh mana strategi yang ada telah berjalan secara efektif, serta bagaimana partisipasi masyarakat, kelembagaan, dan dukungan kebijakan menjadi faktor penentu dalam efektivitas strategi pengelolaan sampah di daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam, melalui pengumpulan data yang bersifat naratif, bukan angka. Pendekatan ini digunakan agar peneliti dapat memahami dan menggambarkan strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dalam konteks nyata dan berdasarkan perspektif para pelaku kebijakan serta masyarakat. Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori manajemen strategik Fred R. David (2016), yang menjelaskan bahwa strategi mencakup tiga tahapan utama, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menelaah sekaligus menganalisis bagaimana ketiga tahapan strategi dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dalam konteks pengelolaan sampah. Teori ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan konseptual, tetapi juga sebagai alat analisis untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan.

Teknik pengumpulan data

- a. Penelitian menggunakan observasi partisipatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016) yang menyatakan bahwa observasi partisipasi merupakan pengamatan di mana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
- b. Wawancara, dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan yang dipilih secara *purposive*, antara lain pejabat struktural Dinas Lingkungan Hidup dan tokoh masyarakat
- c. Studi Dokumentasi, dilakukan dengan menelaah dokumen resmi dan literatur ilmiah yang relevan.

Teknik analisis data

Menurut Sugiyono (2024: 131), analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016: 246) yang melibatkan tiga tahap utama:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah proses pengumpulan dan penyederhanaan data penelitian. Sugiyono (2016: 247) menyebutkan bahwa semakin lama peneliti turun ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, berfokus pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya
- b. Penyajian Data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016:249) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, data yang telah direduksi dan disajikan dianalisis lebih lanjut untuk menarik kesimpulan. Sugiyono (2016: 252) menjelaskan bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Uji keabsahan data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari pihak Dinas Lingkungan Hidup maupun masyarakat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih objektif dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya melalui tiga tahapan strategis yang dikemukakan oleh Fred R. David (2016), yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Ketiga tahapan ini menjadi kerangka analisis utama untuk memahami sejauh mana strategi yang diterapkan telah dirancang secara sistematis, diimplementasikan secara konsisten, dan dievaluasi secara berkelanjutan.

1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan tahap awal dalam manajemen strategis yang berfungsi sebagai landasan penyusunan langkah-langkah kebijakan yang akan dijalankan organisasi dalam jangka waktu tertentu. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya menyusun strategi penanggulangan sampah berdasarkan visi dan misi kelembagaan serta arah kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi yang ingin dicapai adalah terwujudnya lingkungan Kota Tasikmalaya yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan misi-misi yang mendukung program-program pengelolaan sampah secara terpadu, termasuk penanganan sampah liar, pengurangan sampah dari sumber, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Dalam proses perumusan strategi, Dinas Lingkungan Hidup memulai dengan melakukan identifikasi terhadap masalah utama yang terjadi di lapangan. Permasalahan yang paling krusial diidentifikasi adalah meningkatnya volume sampah setiap hari akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat yang tidak diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. TPS liar yang muncul di berbagai titik kota menjadi salah satu indikator lemahnya sistem pengelolaan saat ini. Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada

tempat yang ditentukan dan rendahnya budaya memilah sampah dari rumah tangga memperparah kondisi lingkungan kota. Untuk menyusun strategi yang tepat, Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pemetaan terhadap kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan internal meliputi struktur organisasi yang jelas, adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, serta semangat kerja aparaturnya.

Namun, kelemahannya cukup signifikan, yaitu terbatasnya armada pengangkut, kurangnya fasilitas yang memadai, serta rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data sampah. Sementara itu, dari sisi eksternal, peluang yang bisa dimanfaatkan antara lain adanya potensi dukungan anggaran dari provinsi dan pusat, serta minat sektor swasta untuk berkontribusi melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Adapun ancamannya meliputi ketergantungan terhadap APBD, lemahnya koordinasi antarwilayah, serta tantangan budaya masyarakat yang belum memiliki kesadaran lingkungan yang memadai.

Diagram SWOT Pengelolaan Sampah Kota Tasikmalaya



Gambar 1. Diagram SWOT Pengelolaan Sampah Kota Tasikmalaya

Gambar di atas memperlihatkan analisis SWOT pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya. Kekuatan utama terletak pada dukungan kebijakan daerah, sementara kelemahan terbesar adalah keterbatasan armada dan teknologi. Peluang datang dari dukungan anggaran serta CSR, sedangkan ancaman muncul dari rendahnya kesadaran masyarakat. Hasil analisis SWOT ini menjadi dasar bagi perumusan strategi yang lebih adaptif dan partisipatif, sehingga pembahasan selanjutnya dapat menguraikan implementasi serta evaluasi strategi yang telah dijalankan.

Strategi alternatif seperti menjalin kerja sama dengan komunitas, peningkatan peran bank sampah, serta pengembangan program TPS3R juga mulai dirancang, meskipun belum semuanya berjalan maksimal. Dalam menyusun strategi ini, Dinas juga mencoba merespons dinamika sosial yang terjadi, seperti kecenderungan masyarakat yang masih bergantung pada petugas kebersihan tanpa merasa memiliki tanggung jawab bersama atas lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat pun mulai digagas melalui pelibatan tokoh masyarakat, karang taruna, dan lembaga swadaya masyarakat. Namun, realisasinya di lapangan masih menghadapi berbagai keterbatasan teknis dan non-teknis.

Meskipun telah dilakukan perumusan strategi melalui forum perencanaan internal, partisipasi pemangku kepentingan dari luar dinas masih tergolong minim. Dinas Lingkungan Hidup cenderung menggunakan pendekatan struktural dan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip kolaboratif dan

partisipatif dalam menyusun strategi jangka menengah dan panjang. Padahal, pengelolaan sampah merupakan isu kolektif yang membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh unsur masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang telah dirumuskan perlu ditinjau ulang secara berkala agar senantiasa relevan dan responsif terhadap perubahan di masyarakat serta perkembangan teknologi pengelolaan sampah yang semakin dinamis.

2. Implementasi Strategi

Tahapan implementasi strategi merupakan fase krusial dalam pelaksanaan manajemen strategis, karena pada tahap ini seluruh kebijakan dan program yang telah dirumuskan sebelumnya dioperasionalkan di lapangan melalui kegiatan nyata. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya, Dinas Lingkungan Hidup telah mengimplementasikan berbagai program sebagai upaya untuk mengurangi timbunan sampah, menangani sampah liar, dan meningkatkan kebersihan lingkungan. Beberapa program utama yang dijalankan meliputi pengangkutan sampah harian, penertiban Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar, kampanye edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta pembinaan terhadap bank sampah dan pengelolaan 3R (*Reduce-Reuse-Recycle*).

Namun dalam pelaksanaannya, strategi yang telah dirancang belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan armada pengangkut sampah masih belum mencukupi, sehingga tidak semua wilayah dapat terlayani dengan baik. Ketidakseimbangan antara volume sampah harian dan kapasitas angkut menyebabkan keterlambatan pengangkutan serta penumpukan sampah di beberapa titik, termasuk di TPS yang resmi maupun TPS liar. Hal ini diperparah dengan masih terbatasnya jumlah petugas kebersihan dibandingkan dengan cakupan wilayah yang harus dijangkau setiap hari. Akibatnya, pembersihan lingkungan menjadi tidak maksimal, dan menciptakan persepsi buruk dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Untuk mengatasi persoalan keterbatasan sarana pengangkut dan fasilitas pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya melakukan pengadaan tambahan beberapa sarana prasarana. Berikut ini adalah data pengadaan sarana prasarana terbaru:

Tabel 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana

N o	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah
1.	Dump Truck	3 Unit
2.	Kontainer	30 Unit
3.	Tempat Sampah	85 Unit
Jumlah		118 Unit

Sumber: Kominfo Kota Tasikmalaya, 2025

Pengadaan sarana pengelolaan sampah tambahan ini merupakan bagian dari realokasi anggaran yang pada awalnya untuk pembelian kendaraan dinas Wali Kota dan Wakilnya. Keputusan ini sejalan dengan instruksi efisiensi fiskal dan komitmen Wali Kota Tasikmalaya untuk memprioritaskan kebutuhan publik di sektor kebersihan.

Tambahan armada dump truck terbukti mempercepat pengangkutan sampah di lima kecamatan padat penduduk, kontainer tambahan memungkinkan distribusi pembuangan sampah lebih merata. Hal ini memperlihatkan bahwa pengadaan sarana mendukung efektivitas strategi pengelolaan sampah. Pada Tabel di atas tidak hanya menunjukkan jumlah sarana yang tersedia, tetapi juga dapat dikaitkan langsung dengan peningkatan efektivitas pengelolaan sampah. Misalnya, tambahan 3 unit dump truck berdampak pada percepatan pengangkutan di wilayah padat penduduk, sementara 30 unit kontainer baru memungkinkan distribusi sampah lebih merata di seluruh kecamatan. Hal ini membuktikan bahwa pengadaan sarana berkontribusi nyata terhadap capaian strategi.



Gambar 2. Deretan Kontainer Sampah Baru

Sumber: var.center, 2025

Gambar di atas menunjukkan kontainer sampah baru hasil pengadaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya. Penambahan ini diharapkan mampu memperluas titik pembuangan resmi dan mengurangi keberadaan TPS liar. Adanya kontainer tambahan ini juga mempertegas upaya peningkatan sarana prasarana, meskipun pemerataan distribusi masih menjadi tantangan dalam implementasi strategi.



Gambar 3. Deretan Dump Truck Baru

Sumber: radartasik.id, 2025

Deretan bak kontainer sampah dan dump truck hasil pengadaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya sudah disebar ke berbagai titik strategis dan dioperasikan untuk pengangkutan sampah. Sarana ini diharapkan mampu mendukung pengangkutan sampah secara lebih efektif. Upaya ini menjadi langkah konkret dalam menjawab permasalahan teknis seperti keterbatasan armada pengangkut sampah dan kurangnya tempat pembuangan sampah di ruang publik. Meskipun pengadaan tersebut merupakan langkah progresif, namun jumlahnya masih relatif terbatas dibandingkan dengan cakupan wilayah dan volume sampah harian yang terus meningkat, dan dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada tantangan partisipasi masyarakat dan pemerataan fasilitas ke seluruh wilayah kota.

Dalam aspek edukasi dan penyuluhan, Dinas Lingkungan Hidup telah mengupayakan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya. Namun demikian, kegiatan

sosialisasi ini belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk memilah sampah dari rumah tangga, bahkan masih banyak yang membuang sampah sembarangan di lokasi-lokasi yang bukan peruntukannya. Penyebab utamanya adalah karena kegiatan edukasi yang dilakukan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan cenderung hanya dilakukan secara formal dalam forum-forum terbatas. Selain itu, belum tersedianya sistem informasi atau aplikasi digital yang dapat menunjang penyebaran informasi secara lebih masif dan efisien menjadi salah satu kekurangan dalam pelaksanaan strategi.

Sementara itu, upaya kerja sama dengan pihak swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah mulai dilakukan, namun belum menyentuh seluruh sektor industri yang ada di Kota Tasikmalaya. Pemanfaatan CSR untuk pembangunan sarana pengelolaan sampah dan pendukung kegiatan edukatif masyarakat masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam satu kebijakan yang berkelanjutan. Hambatan lainnya adalah terkait dengan alokasi anggaran. Anggaran untuk program pengelolaan sampah masih terbatas, sehingga berdampak langsung terhadap keberlangsungan beberapa program unggulan seperti TPS3R atau pengembangan bank sampah di lingkungan sekolah dan RT/RW.

Dari sisi koordinasi lintas sektor, implementasi strategi juga belum berjalan dengan harmonis. Masih ditemukan tumpang tindih wewenang antara dinas dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan dalam hal pengelolaan sampah di wilayah. Rendahnya sinergi dan keterpaduan dalam pengambilan keputusan menyebabkan pelaksanaan di lapangan tidak seragam, dan menghambat upaya untuk membentuk sistem pengelolaan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, implementasi strategi memerlukan penataan ulang pada aspek teknis, peningkatan kapasitas personil, pemanfaatan teknologi, serta perkuatan regulasi agar pelaksanaannya benar-benar bisa memberikan dampak nyata terhadap kebersihan lingkungan kota.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data primer dari wawancara dianalisis menggunakan pendekatan tematik, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Beberapa kutipan langsung dari informan dimasukkan untuk memperkuat narasi hasil penelitian.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Wawancara dan Observasi

Informan I	Hasil Wawancara : <i>“Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya berfokus pada program pengurangan dan penanganan sampah untuk mendukung visi pengurangan volume sampah. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sarana, prasarana, dan SDM. Upaya yang dilakukan yaitu memperkuat anggaran melalui dukungan pemerintah daerah serta kerja sama dengan pihak eksternal.”</i>
Informan II	Hasil Wawancara : <i>“Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya menargetkan pengurangan sampah dari sumber sebesar 30% pada 2025. Misinya meliputi optimalisasi pengangkutan, penguatan SDM, peningkatan sarana prasarana, dan sosialisasi masyarakat, dengan strategi berbasis regulasi, kolaborasi komunitas, serta dukungan swasta. Hambatan utama adalah keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk mengatasinya, Dinas melakukan pembinaan, edukasi, dan evaluasi rutin, dengan indikator kinerja berupa kepatuhan jadwal, kedisiplinan, dan produktivitas pegawai.”</i>

Informan III	Hasil Wawancara : <i>“Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya menyusun visi dan misi pengelolaan sampah dengan orientasi pada terciptanya lingkungan bersih dan sehat. Strategi dirumuskan berdasarkan kondisi aktual masyarakat dan diselaraskan dengan regulasi daerah. Tujuan utamanya adalah mengurangi volume sampah ke TPA serta meningkatkan kualitas pelayanan pengangkutan. Namun, pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan fasilitas yang belum memadai.”</i>
Informan IV	Hasil Wawancara : <i>“Masyarakat menilai pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya belum optimal karena keterbatasan infrastruktur dan suprastruktur. Permasalahan utama yang dirasakan adalah kurangnya armada pengangkut dan keterbatasan jumlah TPS di lingkungan masyarakat.”</i>

Tabel di atas menyajikan ringkasan data primer hasil observasi dan wawancara yang menjadi dasar analisis. Ringkasan tersebut membantu memperlihatkan perbedaan fokus setiap informan, baik dari aspek kebijakan, hambatan teknis, maupun persepsi masyarakat.

Data hasil wawancara dianalisis melalui proses reduksi dan kategorisasi tema utama, seperti hambatan teknis, partisipasi masyarakat, dan dukungan kebijakan. Misalnya, salah satu informan menyatakan bahwa “armada pengangkut sering tidak mencukupi untuk menjangkau semua wilayah, sehingga sampah kerap menumpuk di TPS liar” (14). Kutipan ini memperjelas bahwa keterbatasan armada menjadi salah satu masalah paling krusial. Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Budijaya (2023) yang menekankan keterbatasan armada sebagai hambatan utama. Namun, berbeda dengan Kosassy et al. (2022) yang menempatkan kesadaran masyarakat sebagai faktor dominan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa di Kota Tasikmalaya, faktor struktural dan teknis lebih mendesak untuk diatasi dibandingkan aspek perilaku. Hasil penelitian ini mempertegas bahwa di Kota Tasikmalaya faktor teknis lebih dominan, sehingga hasilnya lebih dekat dengan temuan Budijaya (2023) dibandingkan dengan Kosassy et al. (2022). Temuan lapangan juga dapat dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pengelolaan Sampah, yang mewajibkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi daerah dan praktik di lapangan. Meskipun Perda telah mewajibkan partisipasi masyarakat, implementasinya belum efektif karena minimnya pengawasan dan rendahnya kesadaran warga. Dengan demikian, regulasi yang ada masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat. Evaluasi strategi tidak hanya menilai input berupa jumlah sarana prasarana, tetapi juga indikator outcome. Misalnya, adanya pengurangan timbulan sampah harian hingga 10%, meningkatnya jumlah rumah tangga yang memilah sampah, dan bertambahnya partisipasi warga dalam bank sampah di tingkat RT/RW.

Dengan demikian, evaluasi strategi di Kota Tasikmalaya dapat dilihat tidak hanya dari penambahan fasilitas, tetapi juga dari hasil konkret berupa penurunan timbulan sampah, peningkatan praktik pemilahan di rumah tangga, dan keterlibatan aktif warga dalam bank sampah. Indikator-indikator ini menjadi bukti capaian outcome yang relevan untuk menilai efektivitas strategi.

3. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan tahapan akhir dalam proses manajemen strategis yang bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan strategi yang telah dijalankan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi menjadi penting sebagai mekanisme kontrol dan umpan balik agar kebijakan yang dijalankan tidak bersifat statis dan dapat diperbaiki atau disesuaikan dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya secara umum telah melakukan evaluasi strategi melalui kegiatan monitoring dan pelaporan rutin, baik secara internal dalam bentuk laporan kinerja tahunan maupun dalam forum-forum evaluasi lintas sektor.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi strategi masih cenderung bersifat administratif dan formalitas. Evaluasi hanya difokuskan pada pelaporan jumlah kegiatan,

volume sampah yang diangkut, atau luasan wilayah yang terlayani, tanpa menyentuh aspek substansial seperti efektivitas program edukasi, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kebersihan, atau perubahan pola perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Hal ini menyebabkan proses evaluasi tidak sepenuhnya memberikan informasi yang valid dan menyeluruh dalam mengukur keberhasilan strategi secara kualitatif.

Evaluasi internal yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum sepenuhnya didukung oleh sistem penilaian kinerja yang berbasis data *real-time*. Belum ada sistem informasi pengelolaan kinerja yang dapat menampilkan capaian program secara akurat dan cepat. Selain itu, proses evaluasi juga belum melibatkan aktor eksternal seperti akademisi, komunitas lingkungan, maupun masyarakat sipil yang selama ini memiliki perhatian dan peran dalam isu-isu lingkungan. Padahal, pelibatan berbagai aktor sangat penting agar evaluasi bisa menjadi lebih objektif dan reflektif. Evaluasi yang hanya dilakukan secara internal berisiko tinggi untuk bias dan kurang responsif terhadap kritik dari masyarakat.

Meskipun demikian, hasil evaluasi selama ini telah dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan lanjutan, seperti pengajuan penambahan anggaran, peningkatan armada, atau program prioritas di wilayah yang paling terdampak oleh keberadaan TPS liar. Namun langkah-langkah korektif yang diambil masih bersifat jangka pendek dan teknis, serta belum menyentuh aspek perbaikan strategis jangka panjang, seperti pembangunan budaya sadar sampah di tingkat rumah tangga atau penguatan peran kelembagaan RT/RW dalam pengelolaan lingkungan.

Sistem evaluasi strategi perlu diperkuat melalui penggunaan indikator yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, dengan mempertimbangkan persepsi masyarakat, tingkat keberlanjutan program, dan kontribusi setiap elemen dalam mendukung pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup juga perlu mengembangkan sistem evaluasi yang lebih transparan dan akuntabel, serta membuka ruang partisipatif bagi masyarakat agar proses evaluasi tidak hanya menjadi kewajiban birokrasi, tetapi menjadi refleksi bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan kota.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan sampah yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya belum berjalan optimal. Meskipun telah dirancang dengan merujuk pada visi dan misi kelembagaan serta dokumen perencanaan daerah, pelaksanaan strategi masih menghadapi hambatan internal dan eksternal. Pada tahap perumusan strategi, Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun arah kebijakan berdasarkan identifikasi masalah dan potensi yang ada, namun prosesnya masih minim melibatkan aktor eksternal dan belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan kondisi sosial dan lingkungan. Hal ini menegaskan bahwa kelembagaan pengelolaan sampah perlu diarahkan pada sistem yang adaptif terhadap perubahan sosial dan lingkungan.

Implementasi strategi menunjukkan bahwa program-program seperti pengangkutan sampah, penertiban TPS liar, serta edukasi kepada masyarakat telah dilaksanakan, namun belum merata dan belum berjalan baik. Hambatan utama meliputi keterbatasan armada dan Sumber Daya Manusia, rendahnya pemanfaatan teknologi, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sekitar 70% masyarakat belum terlibat aktif dalam pengelolaan sampah. Sementara itu, evaluasi strategi cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh aspek outcome yang lebih mendalam. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa evaluasi strategi masih hanya administratif tanpa basis outcome nyata, sehingga efektivitas program sulit diukur. Penelitian ini menegaskan bahwa kelemahan utama terdapat pada evaluasi yang hanya administratif tanpa basis outcome nyata. Kurangnya sistem evaluasi yang partisipatif dan berbasis data juga menjadi kendala dalam mengukur efektivitas program yang telah dijalankan.

Secara keseluruhan, strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya membutuhkan penguatan pada aspek perencanaan partisipatif, pengembangan sistem pendukung yang modern, serta peningkatan kapasitas kelembagaan agar mampu merespon tantangan pengelolaan sampah secara lebih adaptif dan berkelanjutan. Penelitian ini memperjelas kebutuhan penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi publik dalam strategi pengelolaan sampah perkotaan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena lingkungannya masih terbatas, yakni lebih menekankan pada perspektif Dinas Lingkungan Hidup dan sebagian perwakilan masyarakat, sehingga belum mencakup keterlibatan masyarakat luas secara menyeluruh. Perlu integrasi sistem evaluasi berbasis data, penguatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi sebagai solusi praktis untuk keberlanjutan pengelolaan sampah. Dengan penguatan strategi berbasis data dan partisipasi masyarakat, pengelolaan sampah dapat lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arrahma DA, Novaria R, Soesiantoro A. Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jombang. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*. 2024;2(3):197-208.
2. Budijaya MI. Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Education and Humanity*. 2023;3(4):64-70.
3. Dwipayanti P. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Wilayah Kerja Puskesmas Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 [dissertation]. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan MAB; 2020.
4. David FR. *Manajemen Strategik: Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*. Jakarta: Salemba Empat; 2016.
5. Herman FK, Subagja AD. Strategi Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*. 2023.
6. Kosassy SO, Raid N, Yasmeardi F. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Banuaran Kota Padang. *Abdimas Ekodiksosiora: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*. 2022;1(1):56-61.
7. Nurwanda A. Analisis strategi terhadap peningkatan kepuasan studi analisis di BUMD (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar Patroman. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 2019;5(2):113-122.
8. Rusmanto W. Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. 2022;16(2):102-113.
9. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta; 2016.
10. Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta; 2024.
11. Suwarlan E, Setyaningsih H, Vestikowati E. Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam Mengurangi Pengangguran di Kabupaten Ciamis Tahun 2021. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2022;3(1):357-370.
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah.
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah.

17. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Tasikmalaya dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.